

## BAGIAN KESEMBILAN

# PERILAKU POLITIK, PARTISIPASI POLITIK DAN SOSIALISASI POLITIK

### A. PERILAKU POLITIK

Secara umum perilaku politik dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan keputusan politik (Surbakti, 1992: 131). Perilaku politik juga termasuk kegiatan masyarakat dalam proses meraih kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, serta mengembangkan kekuasaan. Atau dengan rumusan lain perilaku politik adalah semua perilaku manusia baik sebagai individu maupun masyarakat yang berkaitan dengan proses pembuatan kebijakan, konflik, kebaikan bersama, serta kekuasaan.

Dalam melakukan kajian terhadap perilaku politik paling tidak ada tiga unit analisis yang dapat dipilih, yaitu individu aktor politik, agregasi politik, dan tipologi kepribadian politik. Yang tercakup dalam kategori *individu aktor politik* adalah meliputi aktor politik (pemimpin), aktivis politik dan individu warga negara biasa. Sedangkan *agregasi* maksudnya adalah individu aktor politik secara kolektif, seperti kelompok kepentingan, birokrasi, partai politik, lembaga-lembaga pemerintah dan bangsa. Adapun yang dikaji dalam tipologi kepribadian politik ialah tipe-tipe kepribadian pemimpin otoriter, machiavelian dan demokrat.

Dengan mengkombinasikan ketiga pendekatan tersebut di atas akan dihasilkan sebuah model tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik individu aktor politik sebagai berikut:

- a. Lingkungan sosial politik tak langsung, seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya dan media massa;

- b. lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor, seperti keluarga, agama, sekolah, dan kelompok pergaulan;
- c. struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu;
- d. lingkungan sosial politik tak langsung berupa situasi yaitu keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung, ketika hendak melakukan suatu kegiatan, seperti cuaca, keadaan keluarga, keadaan ruang, kehadiran orang lain, suasana kelompok, ancaman dalam segala bentuknya (Surbakti, 1992: 133).

## B. PARTISIPASI POLITIK

Apakah perbedaan antara partisipasi politik dengan perilaku politik? Secara singkat dapat dinyatakan bahwa partisipasi politik adalah merupakan salah satu bentuk dari perilaku politik akan tetapi perilaku politik tidak selalu berupa partisipasi politik.

Partisipasi politik memiliki pengertian keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya (Surbakti, 1992: 140). Mengapa warga negara biasa harus berpartisipasi politik? Jawabnya karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik yang dibuat oleh pemerintah. Kegiatan warga negara biasa ini pada dasarnya dapat dibagi dua. Yakni mempengaruhi isi kebijakan umum dan ikut menentukan pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

Sementara itu Miriam Budiardjo (1981: 1) menyatakan bahwa partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).



suatu kelas yang sedang berusaha untuk menyusun suatu tatanan kehidupan yang lebih baik, yang tidak berorientasi sepenuhnya ke barat tetapi juga tidak anti nilai-nilai barat, dan tetap berpijak pada nilai-nilai dasar Islam.

Polemik tentang keterlibatan Kelas menengah Islam dalam politik di Indonesia, khususnya kelas menengah yang berasal dari cendekiawan (ICMI) jika dilacak ke belakang, adalah berkaitan dengan prinsip-prinsip mendasar seperti pertanyaan yang mendasar sekali bolehkah seorang intelektual itu terjun dalam bidang politik, apakah ia masih dapat menjaga independensi pemikirannya untuk tetap objektif, hanya memihak kepada kebenaran ilmiah, keadilan, apakah ia masih dapat menjaga integritas kepribadiannya sebagai intelektual. Dalam pandangan yang berkembang di negara-negara Barat biasanya mengambil posisi bahwa seorang intelektual-cendekiawan supaya dapat mempertahankan integritas kepribadiannya, tetap memiliki independensi, kemerdekaan berpikirnya ditabukan untuk terjun dalam kehidupan politik, pendukung perspektif seperti ini antara lain Harry J. Benda. Perspektif ini dipengaruhi oleh terjadinya pengkhianatan beberapa intelektual di Perancis yang pada saat itu ikut memuja-muja rejim yang otoriter dengan justifikasinya yang seolah-olah ilmiah, ada kemungkinan sekali perspektif seperti ini dipengaruhi oleh pandangan sekuler yang memisahkan antara fungsi Pendeta yang mewakili institusi Gereja dengan Raja yang mewakili institusi Negara, sebagaimana telah berkembang lama dalam pemikiran di dunia barat. Sedangkan dalam pandangan Islam orisinil sebagaimana diperlihatkan oleh Nabi Muhammad Saw., Abu Bakar, Umar bin Khatab, Ali bin Abi Tholib, Usman bin Affan, tidaklah mengenal pemisahan antara fungsi ulama "kecendekiawanan" dengan fungsi pemerintahan dua fungsi tersebut ada pada satu orang.

Sehubungan dengan diskursus Peranan Kelas Menengah Islam